



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-121 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS INSPEKTORAT
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Intan Jaya tahun 2025 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil maka perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya pada Organisasi Perangkat Daerah pengampu Dana Otonomi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan dana OTSUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan rapat koordinasi pengawasan dana otsus tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati.../4

19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Otsus Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 dan membuat laporan kepada Pimpinan.

KETIGA.../5

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati Intan Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI INTAN JAYA,

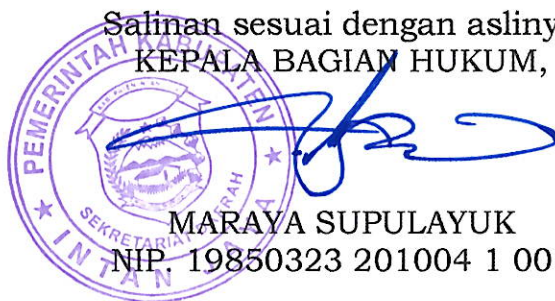
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
 Nomor : 100.3.3.2-121 TAHUN 2025
 Tanggal : 5 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS INSPEKTORAT
 KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	ANER MAISINI, S.Kom.,S.H.,M.H	Bupati Intan Jaya	Pelindung/ Pengarah
2.	ANTONIUS EKO KWN PUTRO, SE Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19751229 200605 1 001	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Penanggung jawab
3.	DANCE TEDIEL, SP Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19731008 199503 1 004	Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4.	PHILIPUS LUTHER BOAS KATMO, ST Pembina (IV/a) NIP. 19770203 201004 1 002	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Intan Jaya	Moderator
5.	CRISTIANUS ZONGGONAU, S.Sos Penata Tk.I (III/d) NIP. 19770731 201004 1 002	Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	SITTI HAJAR, SKM Penata Tk.I (III/d) NIP. 19850525 201004 2 001	Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	LISA ARISANTI PAEMBANG, SE Penata (III/c) NIP. 19780526 201104 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	IMA DWIWURYANI, SP Penata (III/c) NIP. 19790914 201505 2 001	Auditor Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	MARSELINA PALILING, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19901210 202012 2 005	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	INAYATI RORENG , S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19950423 202012 2 011	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota

11. PAULUS KOBEPa, S.H.../7

11.	PAULUS KOBEP, S.H Penata Muda (III/a) NIP. 19871125 202012 1 005	Auditor Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	EMIL WEYA, S.I.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 19871020 202012 1 002	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	EVALISTA YACOMINA KUWET, SE Penata (III/c) NIP. 19830111 201505 2 001	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
14.	JULITA SONDEGAU, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19920408 202012 2 007	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	RENDY KISSYA, S.E Penata Muda (III/a) NIP. 19940416 202506 1 005	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
16.	EMANUEL HANAU, S.Ak Penata Muda (III/a) NIP. 19980813 202506 1 006	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
17.	NELLA SUSI NUMBERI, S.Ak Penata Muda (III/a) NIP. 19980505 202506 2 022	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
18.	MELANIESIANA TEDIEL, SP Penata Muda (III/a) NIP. 19990506 202506 2 024	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
19.	CHELSEA NATALIA DENIS, S.T Penata Muda (III/a) NIP. 19961206 202506 2 008	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
20.	AMELIA FEBBY WANGGAI, S.Ak Penata Muda (III/a) NIP. 19980225 202506 2 016	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
21.	FRANKLIN VICTOR PIRADE, S.T Penata Muda (III/a) NIP. 19930920 202506 1 008	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
22.	STEVANUS PRATAMA AMBOKOK, S.T Penata Muda (III/a) NIP. 19950919 202506 1 005	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
23.	JOHN GILBERS KURNI, A.Md.Tek VII NIP. 19840215 202421 1 015	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
24.	DEVI TANDI Pengatur Muda (II/a) NIP. 19931218 202407 1 001	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota

25.	CHARLES MIGAU Pengatur (II/c) NIP. 19870606 201104 1 004	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
26.	DENIS YANIBI WAMBRAUW V NIP. 19810422 202421 2 006	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
27.	SELVIANUS WANDAGAU Pengatur (II/c) NIP. 19830710 201104 1 001	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
28.	TERINA KIWAK, ST Penata (III/c) NIP. 19880708 201505 2 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
29.	YETI MAGAI Pengatur (II/c) NIP. 19841110 201104 2 003	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001